BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhak mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa :

“setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Oleh sebab itu Negara berkewajiban untuk dapat memfasilitasi warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan untuk menjalankan kewajiban tersebut Negara sangat memerlukan perencanaan yang matang dalam segala aspek.

Pekerjaan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.
2. Pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual baik sementara maupun tetap dengan tujuan pengabdian.

3. Pekerjaan dalam arti khusus yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual di bidang tertentu, sifatnya tetap dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa :

“PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.”

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Pekerja lepas Pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan.
2. Pekerja kontrak Pekerja kontrak adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.
3. Pekerja tetap Pekerja tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan Nasional, mengingat dalam melakukan pekerjaan memiliki resiko yang sangat berbahaya seperti kecelakaan kerja maka perlu dilakukan keselamatan dan kesehatan kerja.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.58

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

“setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.”

Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

“mewajibkan bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan.”

Perlindungan hukum tenaga kerja dikategorikan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perlindungan secara ekonomis Perlindungan secara ekonomis terkadang disebut sebagai jaminan sosial yang merupakan perlindungan terhadap pekerja terkait penghasilannya. Perlindungan ini mencakup usaha-usaha yang dilakukan guna memberikan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan bila pekerja bekerja diluar kehendaknya. Program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, yaitu:²

² Asri Wijayanti, 2017, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta h. 122

- Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belaskasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, dan lainnya.

2. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap pekerja yang bertujuan menjamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaan pekerja dan melindungi kedudukan hukumnya bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan juga diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia juga nilai-nilai agama. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dalam setiap lingkungan kerja. Unsur lingkungan kerja ada 3 (tiga), yaitu:³

- Adanya suatu kegiatan usaha, baik kegiatan yang bersifat ekonomi atau sosial.
- Adanya sumber bahaya.

³ Ashabul Kahfi, Desember 2016 "**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja**", Jurisprudantie, Vol. 3, No. 2, h. 70.

- Adanya pekerja yang bekerja didalamnya, baik yang terus menerus atau dalam waktu-waktu tertentu.

3. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat atau mesin, material atau bahan, jenis pekerjaan, tempat, waktu dan keadaan tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja juga termasuk dalam perlindungan teknis ini. Sebagai petugas pemadam kebakaran, ada dua jenis pekerja yaitu pekerja tetap (PNS) dan pekerja kontrak (Non PNS). Sebagai petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi dan lainnya. Di lain hal, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dan lainnya. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya.⁴ Dalam hal melaksanakan tugas sebagai petugas pemadam

⁴ Wikipedia, 2022, Pemadam Kebakaran, URL : https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran, Diakses pada tanggal 24 November 2022

kebakaran memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi dan dapat membahayakan keselamatan petugas itu sendiri, seperti dalam kasus mobil damkar dengan plat nomor DK 2 F dengan nomor lambung 17 terguling di ujung barat Jalan Bypass Dr Soekarno sekitar 100 meter barat patung Adipura yang termasuk Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, delapan personel Damkar termasuk sopir mengalami luka ringan dan dilarikan ke BRSUD Tabanan.⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja serta faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum tersebut khususnya untuk Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, maka penulis menuangkannya dalam judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA KONTRAK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA SAAT BERTUGAS PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG"**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat betugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung?

⁵ NUSABALI.com, Damkar Pemkab Badung Terguling di Pesiapan, URL : <https://www.nusabali.com/berita/407/damkar-pemkab-badung-terguling-di-pesiapan>, diakses pada tanggal 24 November 2022

2. Apakah faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat bertugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat bertugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui apa faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat bertugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

1.4 METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis empiris atau mengkaji permasalahan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan pendekatan fakta yaitu berdasarkan praktek/ atau kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁶

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah jenis usaha-usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, h.35

⁷ Nomensen Siniamo, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Bumi Ininitama Sejahtera, Jakarta, h.46

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data bersumber dari penelitian data kepustakaan yang telah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum dan literatur yang dikelompokkan dalam :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).⁸ Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 157.

i) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP/100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa literatur-literatur yang memuat mengenai pandangan dari beberapa ahli, buku-buku yang menunjang penelitian ini, serta bahan-bahan internet yang mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di

lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.⁹ Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Bisa dikatakan, observer berada bersama objek yang diteliti.¹⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data atau menemukan permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam dari informan yang terkait berdasarkan laporan diri sendiri, pengetahuan atau keyakinan pribadi.¹¹ Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan responden.¹² Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

3. Teknik Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

⁹ Universitas Raharja, Observasi, URL: <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 24 November 2022

¹⁰ RimbaKita.com, Observasi Secara Langsung, URL: <https://rimbakita.com/observasi/>, diakses pada tanggal 24 November 2022

¹¹ Sutrisno Hadi, 1990, **Metodologi Reseach II**, Andi Offset, Yogyakarta, 137

¹² M Mochtar, 1998, **Pengantar Metodologi Penelitian**, Sinar Karya Dharma IIP, Jakarta, h. 78

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dan terkumpul akan dikembangkan serta dianalisis, data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan sistematis melalui digolongkan ke dalam pola serta tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dengan melakukan analisis kualitatif lalu membuat kesimpulan kemudian data-data dijelaskan secara deskriptif sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam Bab II menjelaskan tentang Kajian Teoritis yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum. Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian

Pekerja Kontrak, Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengertian Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengertian Kecelakaan Kerja dan Gambaran Umum Mengenai Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam Bab III penulis menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat bertugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Dalam Bab IV penulis menjelaskan tentang faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja saat bertugas pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.